BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari kebijakan luar negeri ialah untuk memperoleh keuntungan dari luar agar dapat memenuhi kepentingan dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah perwujudan dari kepentingan nasional suatu negara, yang mana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai akan selalu berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negerinya. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan politik dan keamanan, sosial budaya juga ekonomi.

Setiap negara mempunyai tujuan nasional dan juga kebijakan luar negeri dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Untuk itu setiap negara perlu merumuskan sebuah kebijakan agar dapat hidup bekerjasama dengan negara lain dalam mencapai sebuah tujuan bersama melalui sebuah kerjasama internasional. Negara Amerika Serikat merupakan sebuah negara besar, untuk itu Amerika Serikat mempunyai sebuah kebijakan yang mempunyai nilai besar dalam politik internasional.

Berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*), memunculkan AS sebagai kekuatan tunggal dunia (*The Sole Super Power*). Namun munculnya AS sebagai satu-satunya

negara adidaya ini dibarengi dengan perdebatan sengit di kalangan politikus dan pengambil kebijakan di negara tersebut mengenai karakter politik luar negeri yang akan dijalankan pasca Perang Dingin.

Dalam pengambilan sebuah kebijakan, setiap negara dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional namun faktor domestik lebih diutamakan dalam pengambilan kebijakan luar negeri (Hutabarat, 2005 : 19). Diantara faktor domestik adalah kondisi sosial, ekonomi, politik serta pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan, sedangkan dari faktor internasional adalah kondisi politik internasional yang terjadi saat itu. Begitu pula dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Barack Obama sebagai presiden ke-44 di Amerika Serikat banyak dipengaruhi oleh kelompok kepentingan dari faktor internalnya, terutama setelah turunnya George W. Bush, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang juga masih dipengaruhi oleh neokonservatif dan dipandang sangat kontra terhadap keinginan masyarakat dunia.

Sebagian pengamat dan praktisi politik luar negeri AS berpendapat bahwa AS perlu mempertahankan peranannya sebagai adidaya tunggal. Dalam situasi dunia yang transisional, kehadiran AS mutlak diperlukan guna mencegah kediktatoran, penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Asumsinya bahwa sistem internasional sedang berada dalam kondisi unipolar, dimana AS bertindak sebagai satu-satunya penjaga ketertiban dunia atau “polisi dunia”. Sebagian lain berpendapat bahwa sebaiknya AS lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya pembangunan ekonomi domestiknya yang akhir-akhir ini mengalami kemunduran.

Kalangan ini berpendapat bahwa mempertahankan keterlibatan AS secara luas dalam politik internasional, dengan peranannya sebagai hegemoni tunggal hanya akan menguras dan menghabiskan energi. Lebih baik AS melakukan semacam pembagian beban (*burden sharing*) dengan kekuatan-kekuatan lain seperti Jerman dan Jepang dengan asumsi dunia akan segera mencapai kondisi multipolar, dimana AS tidak perlu lagi bertindak sebagai satu-satunya adidaya. Konstelasi politik internasional seperti ini, menurut Huntington disebut "*uni-multipolar*" yakni AS sebagai adidaya tunggal dalam keamanan dan militer, tetapi mendapat saingan banyak kekuatan dalam bidang ekonomi, terutama Jepang dan Jerman (Huntington, 2005 : 407).

Mengikuti kebijakan luar negeri dari Amerika Serikat (AS), tidak hanya menyediakan pemahaman dari proses kebijakan luar negeri itu sendiri hal tersebut juga menyediakan pemahaman mengenai jenis-jenis kebijakan luar negeri yang telah dicapai Amerika Serikat dari waktu ke waktu. Kebijakan luar negeri atau hubungan luar negeri dalam hal ini mengacu pada lingkup keterlibatan luar negeri dan sekumpulan tujuan-tujuan, strategi dan instrumen yang dibuat oleh pembuat kebijakan pemerintahan.

Dalam kebijakan luar negerinya Amerika menekankan pada beberapa hal penting, yaitu pemerintah karena merupakan pusat dari proses pembuat kebijakan, dimana dalam hal ini Presiden secara langsung mempengaruhi kebijakan dan kemudian bergerak keluar. Presiden akan selalu berusaha mengatur kebijakan luar negeri dan menggunakan Dewan Keamanan Nasional di dalam kancah eksekutif. Kemudian masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang lebih besar dan politik

domestik mempengaruhi pemerintah dan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal tersebut meliputi peran nilai-nilai kepercayaan yang dianut publik. Termasuk di dalamnya partisipasi politik, memahami input dari partai politik dan proses pemilihan serta peran kelompok kepentingan dan pergerakan sosial, dan yang terakhir yaitu Lingkungan dan Power AS, yakni segala perubahan yang terjadi dalam lingkungan global dan power AS akan mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat (Rosati, 2004 : 9).

Di sisi lain tragedi 11 September 2001, telah membawa dampak yang sangat fantastis dalam perputaran kebijakan global AS. Terutama perubahan esensi dalam pola politik luar negeri "polisi dunia" terhadap negara-negara Timur Tengah dan seluruh negara di dunia pada umumnya. AS tetap menjalankan kebijakan yang kontroversial dan tidak lagi menempatkan isu demokrasi di dunia Arab. Di satu pihak, AS mendeklarasikan perang terhadap teroris yang sering kali melakukan kebijakan tidak demokratis dengan cara berkoalisi dengan rezim diktator atau semidiktator di Asia atau Timur Tengah dalam melancarkan perang terhadap teroris.

Lebih dari itu Amerika Serikat juga akan selalu berupaya agar tetap bebas, aman dan merdeka dari segala pengaruh maupun invasi dari pihak luar yang tidak diinginkan. Oleh karena itu Pemerintah Amerika Serikat menitikberatkannya pada strategi kemanan nasionalnya, yang dicantumkan sebagai berikut:

1. Memperkuat Pertahanan Nasional
2. Memperkuat Keamanan Dalam Negeri
3. Memerangi Ancaman Terorisme

4. Membangun Kapasitas untuk Mencegah Konflik
5. Mencegah Penyebaran dan Penggunaan Senjata Pemusnah Massal/*Weapons of Mass Destruction* (WMD)
6. Menghadapi Perubahan Iklim
7. Menjamin Akses ke Ruang Bersama (*Shared Space*), yaitu Keamanan Cyber (*Cybersecurity*), Keamanan Ruang Angkasa (*Space Security*), serta Keamanan Udara dan Maritim (*Air and Maritime Security*)
8. Meningkatkan Keamanan Kesehatan Global

(*The National Security Strategy of the United States of America* 2015 melalui https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/2015_ national _security_strategy.pdf diakses 17 Oktober 2016).

Dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat mencerminkan pandangan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tunggal di dunia yang meyakini bahwa pendekatan militer merupakan pendekatan terbaik yang dapat dilakukan dalam usaha memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingan keamanannya (Sukma, 2003). Hal ini dapat dilihat dalam berbagai hubungan kerjasama Amerika Serikat dengan berbagai negara di dunia dalam rangka mencapai berbagai tujuan dan kepentingan Amerika Serikat. Pelaksanaan strategi tersebut terutama untuk mengamankan kepentingan-kepentingannya. Amerika Serikat dapat memanfaatkan sumber daya, seperti perekonomiannya, sekutu-sekutu di bawah kepemimpinan yang tegas dapat menunjang politik luar negerinya, kekuatan militer yang besar dan diplomasi.

Pada masa George W Bush, kebijakan luar negeri Amerika Serikat cenderung lebih mengutamakan militer/*hard power* tanpa memperdulikan kecaman-kecaman baik dari negara lain maupun dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Kecaman tersebut pernah muncul ketika Amerika Serikat menyerang Afghanistan yang diduga sebagai basis terorisme dan Amerika memanfaatkan kebijakan *self defense* untuk melakukan *pre-emptive strike*. Pada pasal 51 resolusi 1368 tahun 2001 diterangkan apabila penyerangan tersebut didasarkan atas *self defense* maka negara yang menyerang tersebut harus segera melaporkan tindakannya ke DK (Dewan Keamanan) PBB. Namun pada kenyataannya Amerika belum bahkan tidak melaporkan kejahatan kemanusiaannya terhadap DK PBB atas penyerangannya terhadap Afghanistan (Mauna, 2005 : 663).

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari George W Bush kepada Barack Obama tahun 2009 lalu merupakan sebuah fenomena yang baru pertama kali terjadi, karena untuk pertama kalinya kandidat presiden Amerika Serikat yang berasal dari kulit hitam ini mampu memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009. Presiden George Bush merupakan presiden yang berasal dari partai Republik sedangkan calon presiden Barack Obama berasal dari partai Demokrat. Untuk itu sudah pasti kebijakan yang diambilpun berbeda. Kebijakan presiden George Bush terkenal dengan keras dan lebih mengedepankan militer sedangkan senator Barack Obama lebih mengedepankan diplomasi (Muna, 2009 : 86-87).

Berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh tentara Sekutu (dimotori oleh Amerika Serikat) telah membuka babak baru dalam sejarah politik Korea. Kemenangan tentara sekutu atas tentara Jepang merupakan akhir dari

penjajahan Jepang terhadap bangsa Korea. Bercita-cita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat pasca pendudukan Jepang, bangsa Korea berada dibawah kontrol negara-negara pemenang perang dunia II (Yoon & Mas'oed, 2003 : 114).

Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi Semenanjung Korea menjadi dua bagian. Korea terbagi pada garis lintang 38 derajat menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Uni Soviet menguasai bagian utara dan terbentuk menjadi *Democratic People's Republic of Korea,* sementara Amerika Serikat menduduki bagian selatan dan berdiri sebagai *Republic of Korea*. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan sama-sama mengadopsi ideologi yang dimiliki oleh negara yang pernah menguasainya dan terlibat dalam persaingan ideologi hingga pada masa sekarang.

Pemisahan Semenanjung Korea tersebut merupakan awal dari pengenalan teknologi nuklir oleh Korea Utara. Korea Utara mendapatkan ilmu tentang nuklir secara tidak langsung dari Uni Soviet, yaitu ketika dilakukan penelitian mengenai penambangan biji monazit oleh Uni Soviet. Pengembangan energi nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1965 berupa pembangunan reaktor nuklir model Uni Soviet untuk tujuan penelitian di Yongbyon. Pada tahun 1970 Korea Utara kembali membangun reaktor nuklir yang kedua. Korea Utara menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada tahun 1985, dan pada tahun 1989 kegiatan nuklir Korea Utara terdeteksi oleh satelit komersial Perancis.

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari *Nuclear Non-Proliferation* (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi nuklir pada tahun 1993. Tindakan Korea Utara menarik diri dari NPT jelas menimbulkan

reaksi dunia, khususnya Amerika Serikat. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan *International Atom and Energy Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak. Hal ini berbeda jauh dengan laporan Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya (Kronologi Program Nuklir Korut melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.htm diakses 18 Oktober 2016).

Dengan hasil itu IAEA segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari NPT sebagai aksi protes. Hampir setahun penuh negosiasi dilakukan namun gagal, kemudian konflik tentang masalah nuklir Korea ini sempat membawa krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994. Puncak dari krisis nuklir tahap pertama terjadi pada tahun 1998 dimana Korea Utara meluncurkan rudal *Taepodong-1* dengan jangkauan jelajah 1.700 km sebagai uji coba.

Pada tanggal 23 Desember 2002, Korea Utara kembali mengejutkan masyarakat internasional dengan mengumumkan secara resmi pengaktifan kembali program nuklirnya. Pyongyang menyebutkan bahwa pihaknya sengaja membuka fasilitas nuklirnya karena Korea Utara mengalami krisis energi. Pyongyang berpendapat bahwa kepemillikan senjata nuklir merupakan hak negara berdaulat untuk mempertahankan kebebasan bangsa, keamanan negara dan mencegah perang.

Atas dasar premis tersebut, Korea Utara menolak untuk patuh pada ketentuan intemasional. Sikap Korea Utara ini dibuktikan dengan pengusiran terhadap tim inspeksi *International Atomic Energy Agency* (IAEA) pada tanggal 31 Desember 2002 dan penarikan diri Korea Utara dari Traktat Non-Proliferasi pada tanggal 9 Januari 2003.

Pada bulan Juli 2006, Korea Utara kembali meluncurkan *Taepodong-2* yang memiliki jangkauan tembak lebih jauh. Tindakan ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan juga negara-negara didunia. PBB kemudian memberikan sanksi embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara, yang dituangkan dalam Resolusi 1718 Tahun 2006. Dorongan dan tekanan dari sejumlah pihak untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara akan dianggap atau sama artinya dengan mengajak perang.

Duta Besar Gil Yon sebagai Duta Besar Korea Utara untuk PBB mengatakan bahwa "*Jika Amerika menambah tekanan terhadap Korea Utara, kami akan terus melakukan aksi-aksi balasan. Kami menganggap itu sebagai ajakan perang*". Korea Utara menolak mentah-mentah Resolusi 1718 yang telah diberlakukan oleh DK PBB. Semakin banyak sanksi yang diterima maka semakin kuat pula respon yang akan diberikan oleh Korea Utara (http://www.dw.com/id/resolusi-keras-pbb-untuk-korea-utara-disahkan/a-2935205 diakses 18 Oktober 2016).

Pada tanggal 26 Mei 2009 dunia kembali dibuat gempar oleh uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut mengakibatkan terjadinya gempa dengan kekuatan 4,5 skala *richter*. Diperkirakan ledakan dahsyat tersebut dihasilkan dari peledak seberat 20 ton, yang setara dengan bom-bom Amerika yang

diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Presiden Amerika Barack Obama menyatakan program nuklir Korea Utara itu merupakan ancaman besar terhadap perdamaian dunia. Uji coba nuklir ini telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718.

Pada 12 Februari 2013, media Korea Utara mengumumkan bahwa negara tersebut telah melancarkan uji coba nuklir bawah tanah, yang merupakan uji coba ketiganya dalam tujuh tahun. Gempa yang diakibatkan oleh uji coba dilacak oleh *China Earthquake Networks Center*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Preparatory Commission* dan *United States Geological Survey*, dan tercatat berskala 4,9 (nantinya diubah menjadi 5,1) SR. Sebagai tanggapan, Jepang menyerukan pertemuan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Korea Selatan meningkatkan status waspada militer (http://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2013/on-the-ctbtos-detection-in-north-korea/ diakses 19 Oktober 2016).

Selanjutnya Korea Utara melakukan peledakan nuklir keempat pada 6 Januari 2016 di 10:00:01 UTC + 08:30. Di situs nuklir Punggye-ri, sekitar 50 kilometer (30 mil) barat laut dari Kota Kilju di Kabupaten Kilju. Media Korea Utara membuat pengumuman bahwa rezim Kim Jong Un telah berhasil menguji bom hidrogen. Namun, para ilmuwan sebagai pihak ketiga serta pejabat dan lembaga di Korea Selatan meragukan klaim Korea Utara dan berpendapat bahwa perangkat seperti itu lebih cocok digunakan untuk bom fisi seperti fisi senjata pendorong. Senjata tersebut menggunakan fusi hidrogen untuk menghasilkan daya ledak lebih kecil, hulu ledak lebih cocok digunakan untuk mempersenjatai perangkat pengiriman senjata seperti rudal, bukan untuk mencapai kekuatan destruktif

sebagaimana bom hidrogen yang sebenarnya (http://www.bbc.com/news/world-asia-17823706 diakses 19 Oktober 2016).

Uji coba tersebut menuai kecaman dan kritik dari masyarakat internasional. Meskipun Tiongkok dan Rusia menyerukan agar Korea Utara untuk kembali ke hasil kesepakatan perundingan enam negara, Korea Utara tetap mempertahankan ambisinya untuk mengembangkan senjata nuklir, yaitu pada tanggal 22 Juni 2016, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal darat jarak menengah *Musudan-1* ke ketinggian 1,413.7 kilometer (878.4 mi) dan dengan jangkauan 400 kilometer (250 mil). Serta pada tanggal 24 Agustus 2016, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam, *Pukkuksong-1* ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang dengan jangkauan 500 kilometer (310 mil) dan ketinggian yang sama. Korea Utara tengah mengembangkan teknologi untuk dapat melakukan serangan kedua dengan menggunakan teknologi sistem peluncuran vertikal yang lebih baik dan roket berbahan bakar padat (https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions diakses 19 Oktober 2016).

Dan baru-baru ini pemerintah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 September 2016 di Situs Uji Coba Nuklir *Punggye-ri*, sekitar 50 kilometer (30 mil) sebelah barat laut dari Kota Kilju. Uji coba ini dilatarbelakangi oleh latihan militer gabungan dua tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan antara *Foal Eagle* dan *Ulchi Freedom Guardian* pada bulan Februari sampai April kemudian pada bulan Agustus sampai September 2016. Korea Utara menganggap latihan tersebut sebagai "*kekuatan musuh yang sedang mempersiapkan untuk invasi ke Korea Utara*". Pada tanggal 5 September 2016, Korea Utara menembakkan tiga

rudal *Rodong-1* berturut-turut dengan akurasi yang tinggi. Hal ini menandai *Rodong-1* sebagai rudal yang layak untuk dioperasikan dalam perang sejak pertama sukses meluncur di tahun 1993. Dewan Keamanan PBB mengutuk uji coba rudal Korea Utara, yang kemudian Korea Utara merespons dengan keras langkah tersebut (http://edition.cnn.com/2016/09/05/asia/north-korea-ballistic-missiles/ diakses 19 Oktober 2016).

Uji coba tersebut dilakukan pada 9 September 2016, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-68 Korea Utara. Menurut perkiraan pemerintah Korea Selatan dan Jepang, daya ledak nuklir yang dihasilkan setara dengan sekitar 10 kiloton TNT (10 kt), yang menghasilkan gempa sekitar 5,3 skala kekuatan momen. Ledakan ini menjadi daya ledak tertinggi yang pernah dicapai oleh Korea Utara. (http://www.bbc.com/news/world-asia-37314927 diakses 19 Oktober 2016).

Presiden AS Barack Obama, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sepakat untuk bersama-sama mengambil langkah yang signifikan, termasuk sanksi baru, untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang segera mengadakan rapat darurat tertutup dengan Dewan Keamanan PBB, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada 9 September, Dewan Keamanan sangat mengutuk uji coba tersebut dan mengatakan bahwa akan mengambil langkah signifikan untuk merespons uji coba tersebut. Pernyataan tersebut mengatakan tindakan non-militer, tindakan seperti sanksi akan diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/31/remarks-president-

obama-president-park-geun-hye-republic-korea-and-prime diakses 20 Oktober 2016).

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan dari Presiden Obama yang menyatakan; "Amerika Serikat tidak pernah, dan tidak akan menerima Korea Utara sebagai negara senjata nuklir. Bukannya memperoleh keamanan nasional dan tujuan pengembangan ekonomi yang dicita-citakan, tetapi aksi provokatif dari Korea Utara justru membawa isolasi dan kemiskinan bagi rakyatnya melalui usaha yang keras untuk mencapai kapabilitas senjata nuklir dan rudal balistik". Uji coba saat ini, adalah pelanggaran terang-terangan dari berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB, membuat Korea Utara yang terus melanggar norma internasional dan sikap umumnya akhirnya menunjukkan mereka tidak mempunyai minat untuk bergabung dalam masyarakat internasional (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/09/statement-president-north-koreas-nuclear-test diakses 20 Oktober 2016).

Semua uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, mendapat banyak kecaman dari dunia internasional. Bukan hanya dari negara-negara Barat tetapi juga oleh Cina dan Rusia yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Korea Utara. Tekanan dari dunia internasional ini tampaknya tidak membuat Korea Utara menghentikan langkahnya. Sebaliknya Korea Utara lebih memperlihatkan sikap menantang, dengan tetap mengadakan uji coba nuklir. Situasi ini tentu saja menimbulkan ketegangan dan menghambat penciptaan stabilitas keamanan internasional khususnya di wilayah Asia Timur.

Korea Utara ingin semakin memperkuat militernya menjadi sebab utama mengapa kemudian Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan teknologi nuklir. Menurut Korea Utara, kekuatan militer konvensional saja belum cukup. Terdapat beberapa skenario yang melatar belakangi pengembangan teknologi senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Pertama, Pyongyang sedang gencar melakukan usaha untuk menjalin komunikasi dengan Korea Selatan yang selama ini saling bermusuhan, kedua adalah Korea Utara ingin mendapat perhatian dari pihak Amerika Serikat. Ketiga, pemerintahan Korea Utara bermaksud untuk memperkuat legitimasi politik Kim Jong Un, selaku suksesor dari Kim Jong Il. Keempat, Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang senjata nuklir untuk digunakan melawan Korea Selatan, Jepang atau bahkan Amerika Serikat (Er-Win, 2013 : 553).

Lebih dari pada itu, di Korea Utara berkembang paham *juch*e yang sudah tertanam pada rakyat Korea Utara. Paham *juche* menekankan bahwa Korea Utara bebas menentukan nasibnya sendiri serta tidak tergantung dengan negara lain. *Juche* didefiniskan sebagai bentuk dari sosialisme nasionalis khas Korea Utara yang berjuang untuk mencapai kemerdekaan dan *self-reliance* dalam berbagai bidang kehidupan. Apabila dikaitkan dengan konsep aksi reaksi, pemerintah Korea Utara mengembangkan senjata nuklirnya karena bereaksi terhadap keadaan di sekitar.

Sebagaimana yang diketahui bahwa kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang penuh dengan konflik, persaingan antar negara, seperti Cina dengan Taiwan, Cina dengan Jepang, Korea Selatan dengan Jepang dan Korea Utara dengan negara tetangganya, Korea Selatan. Kondisi tersebut semakin diperparah

dengan kedatangan Amerika Serikat yang beraliansi dengan Jepang dan Korea Selatan semakin menimbulkan kecurigaan di kawasan. Melihat hal tersebut, kemudian Korea Utara memutuskan untuk mengembangkan senjata nuklirnya dengan dalih menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman-ancaman asing.

Jo dan Gartzke (2007 : 169) memaparkan bahwa ada faktor-faktor yang mendorong suatu negara mengembangkan nuklir. Pertama, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Suatu negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, cenderung akan melakukan pengembangan dalam bidang nuklir. Dalam hal ini lantaran nuklir merupakan sumber energi yang terbilang sangat ekonomis, bila dibandingkan dengan sumber-sumber energi yang lain, serta disaat yang sama menghasilkan daya yang sangat besar.

Kedua yakni kemampuan dan kapabilitas suatu negara dalam mengelola pengembangan nuklir tersebut. Untuk melakukan pengembangan nuklir, suatu negara perlu memiliki teknologi yang mutakhir, dan tentulah biaya yang diperlukan juga besar. Faktor ketiga, kapasitas negara dalam membuat kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan bahan baku nuklir. Pengembangan nuklir termasuk salah satu proyek pengembangan paling berisiko, sehingga kemampuan suatu negara dalam mengatur kebijakan-kebijakan terkait dengan proyeknya tersebut menjadi faktor utama dalam mendorong kelanjutan suatu negara dalam pengembangan nuklir.

Mengacu pada ketiga faktor diatas, dapat dilihat bagaimana kapasitas Korea Utara dalam mengembangkan nuklir. Dari segi teknologi dan ilmu pengetahuan, semasa Perang Dingin, Uni Soviet berperan besar dalam perkembangan

pengembangan nuklir di Korea Utara. Pada tahun 1956, Korea Utara mengadakan perjanjian dengan Uni Soviet untuk mengembangkan nuklir negaranya. Korea Utara bahkan mengirimkan beberapa ilmuwan ke Uni Soviet untuk belajar mengenai teknologi nuklir.

Kemudian tahun 1964, Korea Utara melihat bagaimana kesuksesan Cina dalam mengembangkan uji coba nuklir, dan Korea Utara melihat itu sebagai kesempatan. Korea Utara berusaha mendekati Cina, namun tidak mendapat respon. Korea Utara kemudian memutuskan untuk mendekati Uni Soviet guna mendapat sumbangan teknologi dan pengetahuan tentang pengembangan nuklir. Korea Utara banyak mengirimkan ahli dan bahkan mendirikan lab-lab penelitian untuk pengembangan nuklirnya.

Tahun 1970, Korea Utara fokus pada mengembangkan nuklir dan menjadikan hal tersebut sebagai ideologi nuklir negaranya (Hughes 2007 : 75). Saat ini, Korea Utara memiliki kemampuan yang cukup untuk terus mengembangkan teknologi nuklirnya, tak hanya sebagai sumber energi tapi juga sebagai senjata pemusnah masal. Dari segi kapabilitas pendanaan, seperti yang telah banyak diberitakan di media yakni bahwa Korea Utara menganggarkan sebagian besar dana APBN negaranya untuk militer yang juga berarti untuk pengembangan tekonologi nuklir. Dari sini, dapat dilihat jelas bahwa Korea Utara memiliki hampir seluruh faktor-faktor pendorong yang mendorong suatu negara mengembangkan nuklir, tak hanya untuk sumber energi, tapi juga untuk senjata massal.

Korea Utara diyakini memiliki cukup plutonium untuk membuat delapan hingga 12 senjata nuklir, yang menurut banyak analis keamanan lebih dari cukup

untuk mencegah ancaman invasi dari Amerika atau Korea Selatan. Bahkan jika uji coba nuklir keempat menunjukkan bahwa kekuatan bom itu lebih lemah dari bom hidrogen, perkembangan terbaru ini tampaknya mengindikasikan bahwa program pengembangan nuklir Korea Utara telah berubah dalam beberapa tahun terakhir dari pertahanan ke strategi militer yang lebih ofensif.

Pyongyang dilaporkan melanjutkan kembali operasi instalasi pengayaan uraniumnya tahun lalu untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar senjata nuklir. Lembaga Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Washington memperkirakan bahwa Korea Utara dapat meningkatkan persenjataan nuklirnya antara 20 dan 100 senjata sebelum tahun 2020. Korea Utara juga terus mengembangkan teknologi misil jarak jauhnya. Pyongyang diyakini memiliki 1000 misil buatan Soviet yang dapat menjangkau Korea Selatan dan Jepang (http://www.voaindonesia.com/a/uji-coba-nuklir-korea-utara-berubah-dari-pertahanan-ke-ofensif/3134827.html diakses 17 Desember 2016).

Dari sudut pandang keamanan, pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara telah memunculkan rasa tidak aman di kawasan. Kepemilikan senjata dan pengembangan nuklir tersebut, menjadikan situasi kawasan berada dalam ketidakpastian. Kawasan Asia Timur menjadi dalam situasi *security dillema*, khususnya bagi Jepang dan Korea Selatan yang selalu merasa berada dalam ancaman serangan nuklir Korea Utara. Korea Selatan yang berada diantara dua negara "*aggressor*", yakni Cina dan Korea Utara yang sama-sama berkompeten dalam mengembangkan senjata nuklir strategis, merasa terancam dan memiliki

ambisi yang sangat kuat pula untuk memiliki senjata nuklir dengan dalih membela diri (Side & Xuang Li, 2003 : 3-4).

Pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush, AS menerapkan kebijakan persuasif terhadap Korea Utara dengan pemberian bantuan-bantuan ekonomi, melakukan normalisasi hubungan kedua negara, dan diikuti dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kebijakan AS terhadap Program Nuklir Korut pada Pemerintahan George W. Bush ditekankan dengan menggunakan instrumen diplomasi multilateral melalui pertemuan *Three Party Talks* dan *Six Party Talks*. Meskipun terdapat beberapa kali pertemuan bilateral antara AS dan Korut di sela-sela pertemuan *Six Party Talks*, AS lebih memilih cara multilateral.

Pada masa Presiden George W. Bush, AS menerapkan kebijakan *war on terrorism* dan meletakkan terorisme sebagai suatu prioritas, sehingga membuat AS terlihat menerapkan kebijakan luar negeri yang begitu mengutamakan pencapaian denuklirisasi Korea Utara dan melakukan tindakan yang konfrontatif dengan menyebut Korea Utara memiliki program nuklir berbasis uranium yang mampu diformulasikan menjadi senjata nuklir yang ofensif. Hal ini membuat Korea Utara, dibawah kepemimpinan Kim Jong Il, mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003 dan menolak segala jenis intervensi internasional baik dari PBB maupun IAEA (Huntley, 2005 melalui http://fpif.org/north_korea_the_npt/ diakses 3 Desember 2016).

Namun, pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, AS terlihat tidak menerapkan kebijakan yang begitu signifikan dan terkesan pasif dalam melihat

urgensi denuklirisasi nuklir Korea Utara. Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, strategi AS diperlihatkan dalam cara berbeda, diplomasi multilateral pasif dengan tindakan tidak adanya hubungan diplomatik antara kedua negara, pemutusan bantuan-bantuan terhadap Korea Utara, serta pernyataan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan dialog dengan Korea Utara (dengan prasyarat).

Perbedaan strategi AS di kedua masa pemerintahan presiden tersebut kemudian dilihat dengan *continuity and change* (keberlanjutan dan perubahan) dimana merupakan hasil dari kebijakan luar negeri pada masing-masing presiden. Terdapat *change* dalam logika politik luar negeri AS era Bush dan era Obama yang menyebabkan terdapat perbedaan pendekatan dan posisi awal membangun negosiasi terhadap Korea Utara. Namun, terlihat *continuity* dalam tujuan dan pendekatan yang digunakan AS terhadap Korea Utara dalam mendenuklirisasi nuklirnya (Hynek, 2009 : 1-2).

Pada awal periode pertama pemerintahan Obama pada tahun 2009, ada banyak harapan bahwa Amerika Serikat mungkin akan menargetkan pembicaraan langsung dengan Korea Utara guna memecahkan kebuntuan pembicaraan kedua pihak selama satu dekade atas program nuklirnya. Presiden Obama berjanji dalam pidato pelantikannya bahwa ia akan menawarkan uluran tangan bagi mereka yang akan mengepalkan tinju mereka, membuat penawaran untuk menghapus hubungan dengan negara diktator.

Namun, Korea Utara menanggapi tawaran ini dengan langkah menegangkan, yaitu peluncuran rudal dan uji coba nuklir pada bulan April dan Mei

2009. Tindakan ini berarti bahwa keputusan kebijakan Korea Utara terkait Presiden Obama akan ditentukan oleh kebutuhan untuk menegakkan rezim non-proliferasi internasional untuk menekan Korea Utara dan akan melibatkan dukungan internasional guna memberikan sanksi terhadap Korea Utara di Dewan Keamanan PBB. Resolusi DK PBB 1874 kemudian mengutuk serangkaian tahap uji coba nuklir dan rudal Korea Utara dan memerintahkan sebuah inspeksi internasional bagi Korea Utara. (*U.S Policy Toward North Korea, Council on Foreign Relations* melalui http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962 diakses pada 21 Oktober 2016).

Pada 8 hingga 10 Desember 2009 para pejabat untuk pemerintahan Obama mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama mereka dengan pemerintah Korea Utara di Pyongyang. Perwakilan khusus kebijakan AS untuk Korea Utara Stephen Bosworth memimpin delegasi ke Pyongyang, dimana ia memberikan surat dari Presiden Obama untuk Kim Jong-Il. Kemudian pada 21 Juli 2010 Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang dalam keterlibatannya atas tenggelamnya kapal Korea Selatan, *The Cheonan*. Berlanjut bulan Agustus pada tanggal 30 di tahun yang sama Presiden Obama menandatangani sebuah perintah eksekutif yang meningkatkan pembatasan keuangan terhadap Korea Utara.

Departemen Keuangan AS juga mengumumkan bahwa telah menjatuhkan sanksi kepada delapan organisasi Korea Utara karena terlibat dalam program nuklir dan rudal Pyongyang. Lalu pada 18 April 2011 Presiden AS Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif yaitu menegaskan kembali larangan atas impor barang, jasa, dan teknologi dari Korea Utara (*Chronology of U.S-North Korean*

Nuclear and Missile Diplomacy, *Arms Control Association* melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses pada 3 Desember 2016).

Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Stephen Bosworth dan Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Gye Gwan bertemu di New York pada 28-29 Juli 2011, sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali perundingan multilateral mengenai program nuklir Korea Utara. Hal ini menandai pertemuan tingkat tinggi pertama antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam hampir dua tahun, dan Amerika Serikat dilaporkan menegaskan kesediaannya untuk memulai kembali perundingan jika Korea Utara berkomitmen untuk menjadi mitra yang berguna dalam proses negosiasi. Setelah 23-24 Februari 2011, pertemuan antara Amerika Serikat dan Korea Utara di Beijing, kedua negara mengumumkan dalam pernyataan terpisah kesepakatan dengan Korea Utara untuk menghentikan operasi di pabrik pengayaan uranium Yongbyon, mengundang inspektur IAEA untuk memantau suspensi, dan melaksanakan moratorium pada tes rudal nuklir jarak jauh (*Arms Control Association* : 2011 melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses 3 Desember 2016).

Amerika Serikat melalui Asisten Menteri Pertahanan untuk Urusan Asia dan Pasifik Peter Lavoy menyatakan telah menghentikan pengaturan untuk memberikan bantuan pangan ke Korea Utara di bawah perjanjian 29 Februari pada 29 Maret 2012 karena Korut mengumumkan peluncuran satelit. Amerika Serikat kemudian memperluas sanksi pada organisasi dan individu Korea Utara yang terlibat dengan program nuklir dan rudal balistik. Dan pada 8 Juli 2016 Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan mengumumkan keputusan untuk menyebarkan baterai

Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) atau sistem anti-rudal balistik yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik jangka pendek dan menengah ke Korea Selatan. Sistem pertahanan rudal ini adalah "langkah pertahanan untuk menjamin keamanan" bagi Korea Selatan (*Arms Control Association*, 2016 melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses 3 Desember 2016).

Pada saat pemerintahan Obama memiliki ruang politik untuk melakukan dialog langsung dengan Korea Utara, telah diputuskan untuk melakukan pendekatan yang oleh Menteri Luar Negeri Clinton gambarkan sebagai "*strategic patience in close consultations with our six party allies*" atau "kesabaran strategis dalam konsultasi erat dengan enam sekutu kami". Penekanan pada koordinasi dan konsultasi telah menjadi prinsip pertama dari setiap keputusan kebijakan pemerintahan Obama terhadap Korea Utara, dan itu sangat dibantu oleh fakta bahwa Obama dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak telah melakukan pembicaraan empat mata dengan kesepakatan kepada prioritas dan pentingnya denuklirisasi Korea Utara.

Strategi Obama juga bersandar pada asumsi bahwa provokasi Korea Utara akan mengakibatkan isolasi diri dari tetangga terdekatnya, tiap langkah tanpa melibatkan Korea Utara tidak akan menghasilkan manfaat politik yang diperlukan dan bisa mengekspos pemerintah untuk resiko politik yang besar. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Robert Gates bahwa pemerintah "tidak akan membeli kuda untuk ketiga kalinya" untuk menujuk kemungkinan perundingan nuklir AS dan mengingat kapasitas jangka pendek Korea Utara untuk lebih memperkuat kemampuan nuklirnya sebagian besar masih terkendali.

Kebijakan "*Strategic Patience*", yakni kebijakan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bisa menunggu Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, selaras dengan realitas politik atas kasus tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010. Namun setelah menurut analisis ilmuwan Universitas Stanford, Siegfried Hecker, upaya Korea Utara untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor ringan telah menuju kepada keberhasilan, sehingga pemerintahan Obama mengadakan tiga kali pembicaraan langsung dengan Korea Utara pada Juli 2011 hingga Februari 2012. Upaya pemerintahan Obama mengejar negosiasi bilateral dengan Korea Utara merupakan usaha untuk memastikan bahwa perundingan bilateral tersebut tidak membuka kesalahpahaman bagi Seoul atau Tokyo (*Council on Foreign Relations*, 2013 melalui http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962 diakses 3 Desember 2016).

"*Strategic Patience*" *Approach* menurut Emma Chanlett-Avery, spesialis hubungan luar negeri kawasan Asia, dan Ian E. Rinehart, analis hubungan luar negeri kawasan Asia, dalam *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, adalah kebijakan untuk bernegosiasi terhadap Korea Utara dengan menerapkan dua cara pendekatan, yaitu:

1. *Waits* atau kesabaran, yaitu usaha diplomasi terhadap Korea Utara untuk bernegosiasi dalam meja perundingan,
2. Pemberian tekanan terhadap rezim Korea Utara. Unsur-unsur utama kebijakan tersebut didasarkan pada pemberian tekanan kepada Pyongyang untuk berkomitmen mengambil langkah menuju

> denuklirisasi, berkoordinasi erat dalam perundingan dan perjanjian dengan Jepang dan Korea Selatan, pendekatan terhadap Cina untuk mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara (Avery & Rinehart, 2014 : 6).

Setelah pengangkatan Presiden Barack Obama, pendekatan ini juga diikuti oleh pemerintahannya. Hillary Clinton dalam pertemuan di Pyongyang pada Desember 2009, mengatakan bahwa pendekatan ini menjadi karakteristik kebijakan AS terhadap Korea Utara dengan komitmen; melanjutkan komitmen untuk denuklirisasi, dedikasi terhadap proses perundingan *Six Party Talks*, keinginan untuk melakukan hubungan berupa dialog (dengan prasyarat), dan bertindak dalam kerangka kerja multilateral untuk memberi sanksi dan tekanan terhadap Korea Utara (Pritchard & Tilelli : 2010). Para pejabat AS telah menyatakan bahwa, di bawah kondisi yang tepat, mereka mencari satu paket komprehensif untuk mencapai denuklirisasi lengkap Korea Utara dengan imbalan normalisasi hubungan dan bantuan yang signifikan, asalkan Korea Utara harus melakukan pembekuan kegiatan nuklirnya dan moratorium pengujian sebelum kembali ke negosiasi.

Putaran ketiga pertemuan bilateral AS-Korea Utara adalah kontak bilateral pertama yang diselenggarakan setelah kematian Kim Jong-Il dan menghasilkan pernyataan sejalan yang disepakati kedua pihak dan dikenal sebagai "*Leap Day Agreement*". Bagi Amerika Serikat laporan tersebut dimaksudkan untuk mencegah Korea Utara melakukan tindakan provokatif seperti uji coba nuklir dan rudal serta mengamankan komitmen Pyongyang supaya kembali ke jalan denuklirisasi. Tetapi kesepakatan itu nampaknya gagal karena tiga minggu kemudian, pada 16 Maret

2012, Korea Utara menyampaikan pengumuman peluncuran satelit pada 12 April 2012.

Pemerintahan Obama selama jangka pertama juga telah melakukan inisiatif dalam kebijakan Asia yang menyediakan hubungan yang lebih luas dan rasa kontinuitas tentang bagaimana Presiden Obama melihat dunia, dan tentang bagaimana ia cenderung untuk menanggapi krisis di masa jabatan kedua. Sejalan dengan preferensi publik Amerika dalam sebuah studi oleh *Chicago Council on Global Affairs* pada 2012 menyatakan, pemerintahan Obama telah menunjukkan keraguan untuk mengejar intervensi militer sepihak dan lebih memilih pendekatan multilateral untuk mengelola konflik sekaligus menekankan "*smart power*"; pendekatan yang mencoba untuk mengintegrasikan pengembangan diplomatik dan internasional dengan militer untuk mempromosikan stabilitas regional (*Council on Foreign Relations*, 2013 melalui http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962 diakses 3 Desember 2016).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terhadap fokus masalah yaitu nuklir khususnya isu nuklir Korea Utara, peneliti menggunakan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai acuan dalam pembahasan.

Penelitian sebelumnya yang penulis jadikan acuan dalam tinjauan pustaka adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaki Haryadi Putra, dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2007 dengan judul "*Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara*". Dalam penelitiannya Zaki menjelaskan bahwa kebijakan Amerika Serikat tentang strategi

pertahanan nasional tidak digunakan sebagai kebijakan luar negeri oleh Amerika Serikat, namun kebijakan tersebut berubah dengan penetapan kembali embargo ekonomi untuk Korea Utara dan Amerika Serikat akan melakukan pertemuan melalui dialog dengan enam negara untuk menyelesaikan nuklir Korea Utara.

Persamaan penelitian yang dilakukan Zaki Haryadi dengan yang dilakukan peneliti saat ini adalah persamaan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terkait nuklir Korea Utara. Sedangkan perbedaannya terletak pada Presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu George Walker Bush yang menjadi presiden sejak 2001-2009, sedangkan peneliti saat ini pada era Barack Obama yang menjadi presiden sejak 2009-2016.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Winingsih pada tahun 2009 dari Universitas Indonesia, yang berjudul "*Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran (Periode 1997 – 2008)*" yang mengkaji mengenai kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Amerika Serikat berkenaan dengan program pengembangan nuklir Iran.

Melalui penelitiannya Sri menyimpulkan bahwa bukanlah masalah keamanan internasional ataupun suatu tindakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat dunia, Amerika Serikat menentang habis-habisan program nuklir Iran. Tapi semua menyangkut kepentingan "pribadi" Amerika Serikat dan sekutu setianya Israel semata. Karena terbukti, walaupun Iran sudah bersikap terbuka dengan membiarkan fasilitas-fasilitas nuklirnya diperiksa IAEA dan banyak menandatangani perjanjian-perjanjian, tetap saja Amerika Serikat menudingkan tuduhan pada Iran. Sementara Israel yang jelas-jelas mengembangkan persenjataan

nuklir dibiarkan begitu saja. Semua itu menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat berstandar ganda dan tidak adil. Dan selama Amerika Serikat masih menerapkan standar ganda seperti itu dan berlaku tidak adil, maka tidak pantas kiranya ia bersikap layaknya polisi dunia yang bertugas menjaga perdamaian dan kemanan internasional.

Persamaan penelitian yang dilakukan Sri Winingsih dengan peneliti saat ini adalah persamaan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap isu nuklir, namun dengan perbedaan negara yang diteliti yang akan diteliti oleh peneliti saat ini yaitu Korea Utara.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Juliati Eka Chandra dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2007 dengan judul "*Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Teknologi Nuklir Iran"*. Dalam penelitiannya Juliati menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap pengembangan teknologi nuklir Iran berpengaruh melalui propaganda.

Hal ini dapat dilihat dari upaya negosiasi AS di forum diplomasi dengan negara-negara lainnya khusus sekutunya dan menghasilkan langkah-langkah yang mampu mengejar pengembangan teknologi nuklir Iran, seperti penandatanganan resolusi dewan keamanan PBB, protokol tambahan IAEA, pembekuan aset Iran di luar negeri, dan pemberian paket insentif yang disusun oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman. Dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui instrumen itu memberikan dampak negatif bagi pengembangan teknologi nuklir Iran, dapat dilihat dari setiap usaha tunggal AS untuk menghambat Iran.

Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kebijakan luar negeri Amerika berkenaan masalah nuklir, namun perbedaannya adalah penelitian Juliati fokus kepada pengaruh dari kebijakan Amerika Serikat, sedangkan peneliti akan memfokuskan kepada kebijakan itu sendiri, juga terletak pada negara yang bersangkutan.

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***"Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama".***

Berdasarkan pemaparan diatas, ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh sejumlah teori yang diambil dari beberapa mata kuliah yang dijadikan kurikulum dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, antara lain:

1. Politik Internasional, membahas mengenai interaksi politik di kancah dunia internasional terutama dengan cara diplomasi dan juga dampaknya yang mana bisa jadi kerjasama ataupun konflik.
2. Analisis Politik Luar Negeri, merupakan mata kuliah yang berkaitan dengan interaksi yang melibatkan antar para aktor politik atau pihak-pihak pemerintahan dengan lintas batas negara.
3. Diplomasi dan Negosiasi, membahas tentang cara berdiplomasi melalui negosiasi dan jenis-jenis diplomasi suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negaranya di dunia Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama".

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama?
2. Bagaimana perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama dibandingkan dengan kebijakan oleh pemerintahan sebelumnya?
3. Bagaimana respon Korea Utara terhadap kebijakan pada program pengembangan nuklir mereka di masa pemerintahan Barack Obama?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti akan membatasi permasalahan penelitian ini dimulai pada tahun 2009, dikarenakan pada tahun tersebut Barack Obama pertama kali dilantik menjadi presiden Amerika Serikat ke-44 serta menjalankan pemerintahannya. Dan penelitian ini akan di batasi sampai dengan tahun 2016 yaitu akhir dari masa jabatan Barack Obama yang telah menjadi presiden Amerika Serikat selama dua periode.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama. Adapun penelitian terhadap masalah yang akan dikaji, dibatasi pada rentang waktu sejak 2009 dimana Barack Obama pertama kali menjabat sebagai presiden Amerika Serikat hingga 2016 yaitu berakhirnya masa jabatan beliau selama dua periode dengan melihat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan selama rentang waktu tersebut.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap program pengembangan Nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama maupun upaya dan langkah-langkah yang dilakukan Amerika dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa perubahan kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya terhadap Korea Utara.

3. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan bagaimana respon Korea Utara terhadap program pengembangan nuklir mereka pada masa pemerintahan Barack Obama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan peneliti serta memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama. Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menguji serta menjelaskan konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional, dimana terdapat sebuah negara adidaya sebagai aktor yang menanggapi salah satu isu keamanan internasional serta sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pengetahuan informasi dan studi empiris bagi kalangan akademisi di bidang Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara.

2. Diharapkan dapat menjadi referensi, masukan, dan informasi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.